

ANALISIS PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PT. BANK SULUTGO)

Fernie Lydia Toar¹, Daisy S.M. Engka², Mauna Th.B. Maramis³

Program Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: fernietoar061@student.unsrat.ac.id, daysiengka@unsrat.ac.id, maunabeatrix@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa pengaruh penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada BUMD (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara (2) menganalisa pengaruh penerimaan Deviden Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada BUMD (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara. (3) menganalisa pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan dari instansi-instansi terkait, menggunakan data *time series* dengan jangka waktu tahun 2011 – 2020. Variabel yang digunakan untuk meneliti adalah dua variabel independent yaitu Penyertaan Modal dan Deviden, serta satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda melalui program *Eviews 8*.

Hasil penelitian menunjukkan (1) variabel penyertaan modal berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara, (2) variabel deviden secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara, (3) variabel penyertaan modal dan deviden secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci : *Penyertaan Modal, BUMD, Deviden dan PAD*

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the effect of the North Sulawesi Provincial Government's capital investment in BUMD (especially PT. Bank SulutGo) on North Sulawesi's Original Local Government Revenue (PAD) (2) analyze the effect of North Sulawesi Provincial Government dividend receipts on BUMD (especially PT. Bank SulutGo) to North Sulawesi's Original Local Government Revenue (PAD). (3) analyze the effect of government capital investment and dividend income together on Regional Original Income.

*The type of data in this study is the type of quantitative data. The data sources in this study are secondary data sources obtained through official documents and reports from related agencies, using time series data with a period of 2011 – 2020. The variables used to examine are two independent variables, namely Capital Investment and Dividends, as well as one dependent variable, namely Original Local Government Revenue (PAD). The data analysis method used in this study is multiple linear regression through the *Eviews 8* program.*

The results of this study showed that (1) the variable of capital investment has a significant and positive effect on the PAD of North Sulawesi Province, (2) the variable of equity participation does not have a positive effect on the PAD of the Province of North Sulawesi. (3) the variable of capital investment and dividends is partially together have a significant effect on PAD.

Keywords: *Capital investment, BUMD, Dividend and PAD*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat. Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat mandiri adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu basis yang paling mendasar di daerah. Agar dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi pengelolaan BUMD, maka sangat diperlukan jiwa *entrepreneurship* yang baik di kalangan pemerintah daerah (eksekutif daerah) sebagai pemegang saham utama BUMD/perusahaan daerah (Sudirno, dkk, 2010). Pembagian penyertaan modal dalam Posisi Investasi Permanen menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Penyertaan Modal Pemprov Sulut per tahun 2020

No	Uraian	Perusahaan	Komposisi Saham
1	Penyertaan modal pada BUMD	a) PT. Bank SulutGo b) PT. Membangun Sulut Hebat (MSH)	37,48% 83,19%
2	Penyertaan modal pada Pihak Ketiga Non BUMD	a) PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) b) PT. Askrida	72,39% 0,138%

Sumber : Data BKAD Provinsi Sulut tahun 2020

Peningkatan kinerja BUMD oleh pemerintah dilakukan dengan cara menganggarkan dan merealisasikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal BUMD melalui APBD. PT. Bank SulutGo adalah satu BUMD milik Pemprov Sulut BUMD yang memiliki peranan yang tidak kalah penting bagi pemerintah daerah. Berikut ini data mengenai penyertaan modal dan deviden Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 2. Setoran Modal dan Deviden Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2011-2020

Tahun	Penyertaan Modal	Deviden	Persentasi
2011	89.574.600.000	23.107.361.219	25,80
2012	89.574.600.000	23.708.334.090	26,47
2013	136.656.900.000	33.010.612.361	24,16
2014	201.859.200.000	29.307.850.110	14,52
2015	233.331.000.000	33.118.647.962	14,19
2016	272.471.100.000	21.209.863.543	7,78
2017	297.471.100.000	31.027.965.309	10,43
2018	297.471.100.000	52.761.456.545	17,74
2019	352.471.100.000	64.793.439.750	18,38
2020	372.471.100.000	42.201.580.825	11,33

Sumber : Bank SulutGo, 2022

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2011 sampai dengan 2020 yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. Penerimaan PAD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2020

No	Tahun	Jumlah PAD (dalam ribu rupiah)
1.	2011	535.087.974
2.	2012	633.650.533
3.	2013	789.631.755
4.	2014	937.681.927
5.	2015	1.012.945.961
6.	2016	1.141.321.190
7.	2017	1.146.674.828
8.	2018	1.253.804.978
9.	2019	1.286.006.930
10.	2020	1.172.932.102

Sumber : Sulawesi Utara Dalam Angka, BPS Sulut, 2022

Tabel diatas menunjukkan perkembangan PAD Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu sepuluh tahun dengan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 pendapatan asli daerah sebesar Rp.535.087.974,- terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.1.286.006.930,-, tetapi di tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan jumlah menjadi Rp.1.172.932.102,- yang turut dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial lainnya, dan aktivitas ekonomi, termasuk pada usaha perbankan yang didalamnya juga yaitu PT. Bank SulutGo.

Dalam pelaksanaan perekonomian daerah di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PT. Bank SulutGo yang didirikan sejak tahun 1961 ini cukup memberi banyak kontribusi berupa deviden yang menjadi salah satu penyangga pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) didalam susunan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Pos ini merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari bagian laba penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah/ kabupaten dalam upaya peningkatan dan pengembangan (Kasmir; 2010). Pemerintah tidak asal memberikan penyertaan modal. Pemerintah Daerah melihat tingkat kesehatan perusahaan dan tingkat profitabilitas perusahaan daerah, karena timbal balik dari penyertaan modal yang dikucurkan pemerintah daerah ke BUMD berupa bagian laba penyertaan modal yang digunakan sebagai pengisi PAD pada setiap tahun anggarannya sebagai kontribusi Bank SulutGo terhadap PAD, seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4. Persentasi Penerimaan Deviden PT. Bank SulutGo pada Pos HPKDD (dalam ribu rupiah)

Tahun	HPKDD	Deviden dari PT. Bank SulutGo	Deviden BUMD dan non BUMD lainnya	Persentasi (%)
2011	23.107.361	23.107.361	-	100,00
2012	24.433.971	3.708.334	725.637	97,03
2013	33.010.612	33.010.612	-	100,00
2014	29.410.022	29.307.850	102.172	99,65
2015	33.225.161	33.118.647	106.514	99,68
2016	45.000.000	21.209.863	23.790.137	47,13
2017	31.361.351	31.027.965	333.38	98,94
2018	52.876.760	52.761.456	115.304	99,78
2019	64.886.989	64.793.439	93.550	99,86
2020	42.255.754	42.201.581	54.173	99,87
TOTAL	379.567.981.219	354.247.111.714	25.320.869.505	93,33

Sumber : Data Olahan dari BPS Sulut dan PT. Bank SulutGo, 2022

Pada Tabel diatas terlihat bahwa pendapatan pada Pos HPKDD dalam PAD ini sebagian besar merupakan kontribusi dari penerimaan deviden PT. Bank SulutGo, dengan rata-rata presentasi 93,33%, bila dibandingkan dengan penerimaan deviden dari BUMD dan Non BUMD lainnya di luar PT. Bank SulutGo. Hal ini dikarenakan perolehan deviden atas penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah masuk dalam Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebagai salah satu komponen pembentuk PAD itu sendiri.

Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Henrikus Triyanto (2015) menyatakan bahwa Penyertaan Modal mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Deviden secara parsial sesuai dengan hasil penelitian Rissa Amosea (2012) yang menyebutkan bahwa secara parsial laba BUMD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari beberapa hal tersebut maka menurut penulis perlu diketahui dengan jelas pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulut dan Deviden yang diterima dari BUMD, khususnya PT. Bank SulutGo atas Pendapatan Asli Daerah Sulut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank Sulutgo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Menganalisa pengaruh penerimaan Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Menganalisa pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara :
 - a. Dari hasil penelitian ini akan diketahui, seberapa besar pengaruh penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat terus meningkatkan Penerimaan Daerah.
 - b. Memberikan informasi tentang pengaruh penerimaan Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank SulutGo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Memberikan informasi tentang pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Bank SulutGo :
 - a. Dari hasil penelitian akan diketahui, seberapa besar penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara, sehingga Bank SulutGo tetap dapat memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.
 - b. Dapat memperoleh informasi tentang pengaruh penerimaan Deviden sebagai kompensasi setoran modal atas investasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo, sehingga Bank SulutGo akan semakin memaksimalkan pengelolaan bisnis bank untuk peningkatan Pendapatan Asli Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- c. Dapat memperoleh informasi tentang pengaruh penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah, untuk mendorong usaha BUMD, khususnya PT. Bank SulutGo.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku". Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Selain itu, pendirian BUMD dapat menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Investasi

Husnan dalam Anoraga dan Pakarti (2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000).

Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah" (Barata, 2004:90). Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

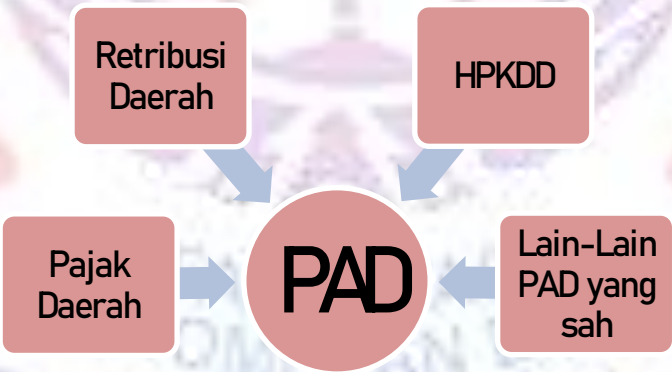
Pendapatan asli Daerah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah:

- “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”
- b. **Retribusi Daerah**
- Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003)
- c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, yakni penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa: “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari Pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Adanya kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Investasi daerah yang berupa kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan APBD. Selain itu, dalam kondisi APBD defisit, maka penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu alternatif pembiayaannya.
- d. **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**
- Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, Lain-Lain PAD yang Sah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah.
- Dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Komponen Pendapatan Asli Daerah



Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Penyertaan Modal

Menurut Balfas (2006) modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrument yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada suatu perseroan tersebut. Oleh karena saham merupakan penyertaan modal dari pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Dengan demikian besarnya kepemilikan seorang pemegang saham atas perseroan ditentukan besarnya penyertaan yang bersangkutan terhadap modal perseroan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu sumber modal BUMD adalah penyertaan modal daerah yang berasal dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Penyertaan modal daerah dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD ini dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

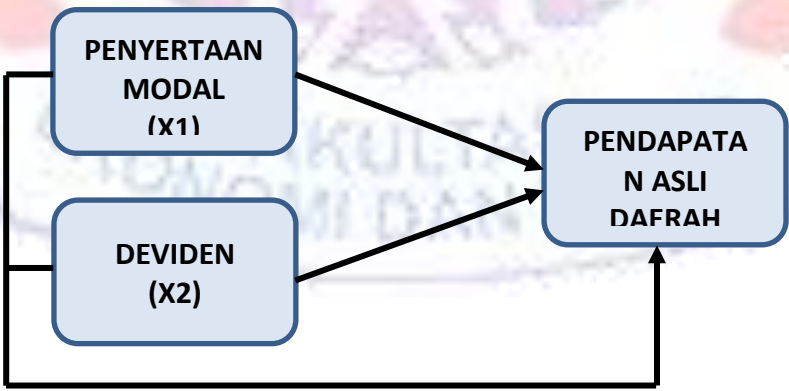
Deviden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dividen adalah bagian laba maupun pendapatan suatu perusahaan yang besarnya telah ditetapkan direksi dan disahkan dalam rapat pemegang saham untuk dibagi-bagikan terhadap seluruh pemegang saham. Definisi Dividen menurut Besley dan Brigham (2008) yaitu pembagian keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan untuk para investornya, baik laba yang didapatkan pada periode sedang berjalan maupun laba pada periode sebelumnya. Kimmel, Weygandt, dan Kieso (2011) memiliki pendapat tentang dividen yaitu distribusi suatu perusahaan terhadap investornya secara profesional sesuai dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing. Maksudnya adalah para investor hanya dapat menerima laba sesuai persentase investasi mereka terhadap perusahaan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan penerimaan Deviden dari Bank SulutGo diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengembangan teori dan kajian empiris serta model penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (khususnya PT. Bank Sulutgo) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara.
2. Diduga peningkatan penerimaan Deviden sebagai kompensasi setoran modal atas investasi pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada badan usaha milik daerah (khususnya PT. Bank

SulutGo berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara tahun 2011 hingga tahun 2020.

3. Diduga penyertaan modal pemerintah dan penerimaan deviden secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan yang diperoleh oleh instansi atau lembaga terkait, yaitu Badan Pusat Statistik, Bank SulutGo, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data yang digunakan adalah data *time series*, dengan jangka waktu selama 10 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Program yang digunakan untuk pengelolaan data adalah program *Microsoft Excel* dan program *Eviews 8.0*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independent (X).

a. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah atau disingkat dengan PAD (Y). PAD diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skala pengukurannya diukur dalam satuan Rupiah.

b. Variabel Independen (Variabel X)

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penyertaan Modal (X_1) adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Skala pengukurannya diukur dalam satuan Rupiah.
2. Deviden (X_2) adalah bagian dari suatu laba yang bisa diberikan kepada para investor yang jumlahnya tergantung pada jumlah saham yang dimiliki oleh setiap investor. Skala pengukurannya diukur dalam satuan Rupiah.

Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, untuk memastikan apakah model regresi linier berganda yang digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan adalah data sekunder sehingga untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu:

a. Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B). Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ (Ghozali, 2009).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai toleransi dan lawannya

(2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2009).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Salah satunya adalah uji *White*. Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

• H_0 : Tidak mengandung indikasi heteroskedastisitas

• H_1 : mengandung indikasi heteroskedastisitas

Jika $\alpha = 5\%$, maka tolak H_0 jika $\text{obs} \cdot R\text{-square} > X^2$ atau $P\text{-value} < \alpha$.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan dengan program *Eviews* untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Hasil yang diperoleh :

Jika nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi.

Jika nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel Penyertaan Modal dan Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun simultan, menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan data Time Series yang diolah menggunakan program *Eviews 8.0*. Formula dari Model Regresi Linier Berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + E$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi pasial untuk masing-masing X_1 dan X_2

X_1 = Penyertaan Modal Pemerintah

X_2 = Deviden

E = Faktor pengganggu

Formulasi model diatas merupakan regresi yang berbentuk linear, dan digunakannya bentuk ini karena secara teoritis variabel terikat yang akan diteliti mempunyai kecenderungan hubungan yang linier dengan masing-masing variabel bebasnya.

Pengujian Hipotesis

Uji Kesesuaian

a. Uji t-parsial (*partial test*)

Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

b. Uji-F (*Over all test*)

Uji F-statistik ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama/serentak terhadap variabel dependen.

c. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R-square*. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Data yang diambil melalui *Annual Report* BSG dan Badan Pusat Statistik, dengan periode waktu per tahun selama 10 tahun, sejak tahun 2011 sampai dengan 2020, sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah PAD Solut, Penyertaan Modal Pemprov Solut, dan Deviden dari PT. Bank SolutGo Tahun 2011-2020

TAHUN	PAD (Variabel Y)	PENYERTAAN MODAL (Variabel X ₁)	DEVIDEN (Variabel X ₂)
2011	Rp 535.087.974.492	Rp 89.574.600.000	Rp 23.107.361.219
2012	Rp 633.650.533.000	Rp 89.574.600.000	Rp 23.708.334.090
2013	Rp 789.631.755.000	Rp 136.656.900.000	Rp 33.010.612.361
2014	Rp 937.681.927.000	Rp 201.859.200.000	Rp 29.307.850.110
2015	Rp 1.012.945.961.000	Rp 233.331.000.000	Rp 33.118.647.962
2016	Rp 1.141.321.190.000	Rp 272.471.100.000	Rp 21.209.863.543
2017	Rp 1.146.674.828.000	Rp 297.471.100.000	Rp 31.027.965.309
2018	Rp 1.253.804.978.000	Rp 297.471.100.000	Rp 52.761.456.545
2019	Rp 1.286.006.930.000	Rp 352.471.100.000	Rp 64.793.439.750
2020	Rp 1.172.932.102.000	Rp 372.471.100.000	Rp 42.201.580.825

Sumber : Pemprov Solut dan Bank SolutGo

Hasil Analisis Regresi

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT. Bank SolutGo, sebagai berikut :

Tabel 6. Statistik Deskriptif dari indeks Total PAD, Penyertaan Modal, dan Deviden dengan Data Log

	Y_PAD	X1_PENY...	X2_DEVIDEN
Mean	11.97989	11.32134	10.52218
Median	12.03150	11.40165	10.50520
Maximum	12.10924	11.57109	10.81153
Minimum	11.72843	10.95218	10.32654
Std. Dev.	0.130605	0.231444	0.157577
Skewness	-0.871961	-0.673773	0.553219
Kurtosis	2.404287	1.982063	2.263230
Jarque-Bera	1.415058	1.188366	0.736265
Probability	0.492861	0.552013	0.692025
Sum	119.7989	113.2134	105.2218
Sum Sq. Dev.	0.153518	0.482096	0.223475
Observations	10	10	10

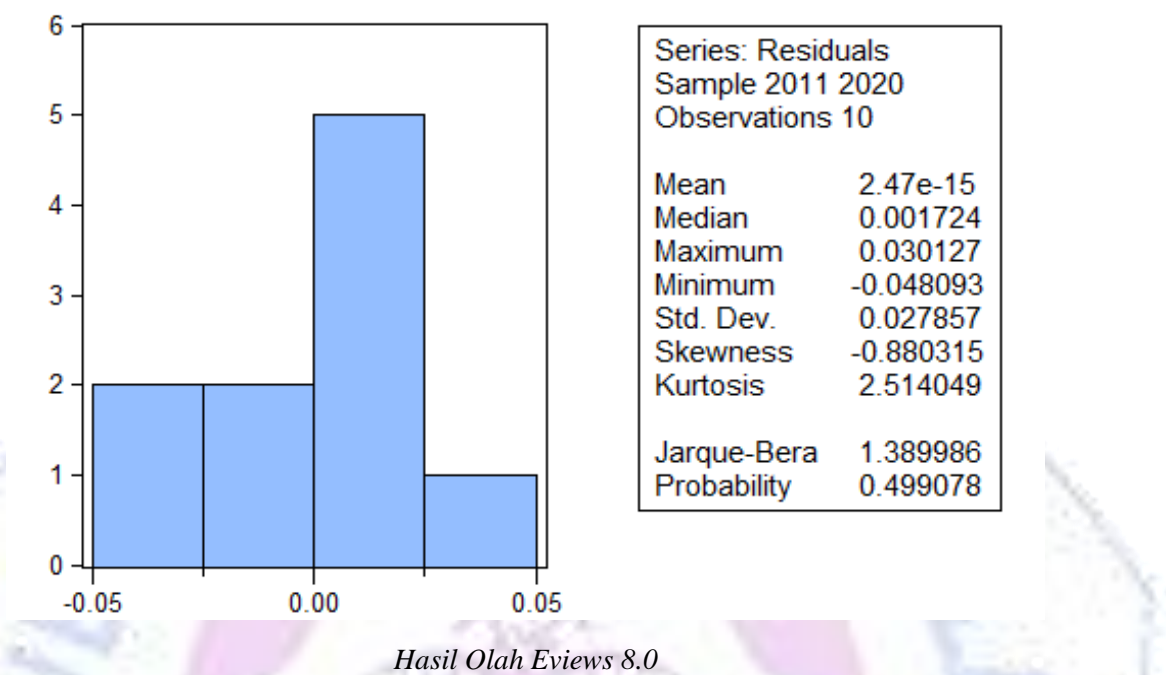
Sumber : Hasil olah eveiws 8.0

Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Suare*), dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas



Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan nilai *Jarque-Bera* (J-B) adalah nilai probabilitas sebesar $0,499078 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 10/01/22 Time: 02:13
Sample: 2011 2020
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.502068	5032.169	NA
PENYERTAAN_MODAL	0.003479	4470.908	1.681010
DEVIDEN	0.007505	8329.933	1.681010

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari hasil pengolahan data di atas ini menunjukkan bahwa :

- Nilai centered VIF dari Penyertaan Modal = 1,681010
- Nilai centered VIF Deviden = 1,681010.

Keduanya bernilai kurang dari 10, maka model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Untuk itu penelitian ini dapat dilanjutkan.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.794344	Prob. F(2,5)	0.5017
Obs*R-squared	2.411237	Prob. Chi-Square(2)	0.2995

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai *probability chi-square* sebesar 0,2995. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya pada model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.984606	Prob. F(5,4)	0.5205
Obs*R-squared	5.517218	Prob. Chi-Square(5)	0.3561
Scaled explained SS	2.046567	Prob. Chi-Square(5)	0.8427

Hasil Olah Eviews 8.0

Pada hasil pengolahan data diatas dapat dilihat nilai *Probability Chi-Square* dari *Obs*R-Squared* sebesar 0,3561 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui.

Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Penyertaan modal (X_1) dan Deviden (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Suares*). Hasil regresi menggunakan data Log (*Lampiran 1.2*) bisa dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan Data Log

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 10/01/22 Time: 00:06				
Sample: 2011 2020				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.557375	0.708568	7.843111	0.0001
PENYERTAAN_MODAL	0.536861	0.058982	9.102070	0.0000
DEVIDEN	0.032743	0.086631	0.377958	0.7167
R-squared	0.954507	Mean dependent var		11.97989
Adjusted R-squared	0.941509	S.D. dependent var		0.130605
S.E. of regression	0.031587	Akaike info criterion		-3.828839
Sum squared resid	0.006984	Schwarz criterion		-3.738063
Log likelihood	22.14419	Hannan-Quinn criter.		-3.928419
F-statistic	73.43478	Durbin-Watson stat		1.548830
Prob(F-statistic)	0.000020			

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari hasil regresi dapat dilihat bahwa baik Variabel Penyertaan modal dan Deviden berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$\text{LogY} = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$

$\text{LogY} = 5.557375 + 0.536861x_1 + 0.032743x_2$

$\text{PAD} = 5.557375 + 0.536861 \text{ Penyertaan Modal} + 0.032743 \text{ Deviden}$

Dari persamaan regresi yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5.557375 menunjukkan bahwa apabila variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) nilainya 0 (nol), maka nilai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 5.557375.
2. Koefisien Regresi Penyertaan Modal (X_1) sebesar 0.536861, yang artinya jika Penyertaan Modal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0.536861, dengan asumsi variabel lain tetap (Konstan).
3. Koefisien Regresi Deviden (X_2) sebesar 0.032743, yang artinya jika Deviden mengalami kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0.032743, dengan asumsi variabel lain tetap (Konstan).

Uji Hipotesis

Secara Partial (Uji t)

Hasil Uji t pada Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Berganda dengan aplikasi Eviews menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Y) adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penyertaan Modal (X_1) memiliki nilai $t_{statistic}$ sebesar 9,102070. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,895. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($9,102070 > 1,895$), berarti H_0 ditolak, menunjukkan bahwa Variabel Penyertaan Modal berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Variabel Deviden (X_2) memiliki nilai $t_{statistic}$ sebesar 0,377958. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,895. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($0,377958 < 1,895$), berarti H_0 diterima, menunjukkan bahwa Variabel Deviden secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 10. dapat dijelaskan pengaruh variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y.

Nilai F-statistik yang diperoleh 73.43478 sedangkan F-tabel 4,737. Nilai F-table berdasarkan besarnya $\alpha = 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3-1) = 2$ dan df untuk denominator $(n-k/10-3) = 7$.

Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa variabel Penyertaan Modal (X_1) dan Deviden (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Koefisien Determinan (R^2)

Berdasarkan pengujian data dengan Eviews 8 yang dapat dilihat pada Tabel. 10. diatas, maka diperoleh data besarnya R^2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.954507. Hal tersebut berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.954507 atau sebesar 95% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pembahasan

Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Hasil pengujian statistik menemukan bahwa variabel Penyertaan Modal Pemerintah Sulawesi Utara pada BUMD dalam hal ini PT. Bank SulutGo mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat dilihat jika Penyertaan Modal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0.536861 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berpengaruh pada upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian terkait Penyertaan Modal ini secara parsial memiliki perbedaan kesimpulan dari hasil penelitian dengan Penelitian Terdahulu dimana Henrikus Triyanto (2015) menyatakan bahwa Penyertaan Modal mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah akan dipergunakan sebagai modal usaha PT. Bank SulutGo untuk memperoleh hasil keuntungan perusahaan yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan PAD Sulawesi Utara, sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Pengaruh Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial deviden yang diterima dari PT. Bank SulutGo tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini terlihat jika ada kenaikan sebesar 1%, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara hanya naik sebesar 0.032743 atau tidak berpengaruh secara signifikan.

Hasil penelitian terkait Deviden ini sejalan atau sesuai dengan hasil penelitian Rissa Amosea (2012) yang menyebutkan bahwa secara parsial bahwa laba BUMD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo memperoleh manfaat ekonomi yaitu dengan penerimaan deviden dalam jangka waktu tertentu dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah. Nilai deviden tersebut ditetapkan berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Pemegang Saham. Deviden ini dimasukkan dalam pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, dimana penerimaannya berasal dari hasil penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Non BUMD. Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan realisasi APBD tahun 2020, dapat dilihat kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari :

Tabel 11. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Pos	Jumlah (Rp)	Kontribusi
1	Pajak daerah	930.415.146.643	83%
2	Retribusi daerah	114.784.249.029,63	10%
3	HPKDD	42.255.754.286	3,7%
4	Lain-lain PAD yang sah	37.862.638.056,96	3,3%
Total PAD		1.125.317.788.015,9	100%

Sumber : Data BPS dan APBD Pemprov Sulut, 2020

Pada Tabel 11 ini terlihat bahwa pos penerimaan terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah sebesar 83%, yang diikuti oleh Retribusi Daerah sebesar 10%. Selanjutnya pos HPKDD memberikan kontribusi pendapatan untuk PAD sebesar 3,7%, dan yang paling kecil yaitu berasal dari Lain-Lain PAD yang sah, hanya sebesar 3,3%. Sehingga penerimaan Deviden PT. Bank SulutGo terlihat tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, bila diteliti kembali pada Tabel 4. Persentasi Penerimaan Deviden PT. Bank SulutGo pada Pos HPKDD dalam Bab I sebelumnya, terlihat bahwa sumber pendapatan pada Pos HPKDD dalam PAD ini sebagian besar merupakan kontribusi penerimaan deviden dari PT. Bank SulutGo, dengan rata-rata presentasi 93,33%, selang tahun 2011 – 2020. Sedangkan penerimaan deviden dari BUMD dan Non BUMD lainnya di luar PT. Bank SulutGo hanya memberikan kontribusi sebesar 6,67% saja pada penerimaan PAD Sulut.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pengaruh Deviden PT. Bank SulutGo terhadap PAD Provinsi Sulut walaupun tidak berpengaruh positif secara keseluruhan terhadap jumlah PAD, namun secara khusus sangat berpengaruh dalam menambah Pos HPKDD, jauh melampaui BUMD dan Non BUMD lainnya yang diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengaruh Penyertaan Modal dan Deviden secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penyertaan Modal dan deviden secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini terlihat dari

sumbangan pengaruh variabel independen (Penyertaan Modal dan Deviden) atau R_2 yang memiliki nilai sebesar 0.95 atau 95%, menunjukkan Penyertaan Modal dan Deviden secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Penyertaan Modal yang dilaksanakan pada BUMD, dalam hal ini pada PT. Bank SolutGo dapat memberikan kontribusi keuntungan (*feedback profit*) yang besar kepada pemerintah daerah berupa laba dan juga kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya menyertakan modal dalam bentuk investasi dalam kegiatan kepermerintahannya dan selalu menerima laba atas hasil penyertaan modal untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyertaan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena Penyertaan Modal yang dilaksanakan pada PT. Bank SolutGo dapat memberikan kontribusi keuntungan (*feedback profit*) yang besar kepada Pemerintah Daerah.
2. Deviden secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2020 disebabkan oleh karena Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDD) dan Lain-Lain PAD yang Sah. Deviden PT. Bank SolutGo sebagai BUMD hanya mengisi 1 (satu) komponen diantara keempat komponen tersebut, yaitu HPKDD. Namun dari beberapa BUMD dan Non BUMD yang menerima penyertaan modal dari pemerintah provinsi, PT. Bank SolutGo merupakan BUMD yang memberikan kontribusi terbesar dalam pos HPKDD dalam penerimaan Deviden untuk menambah PAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni sebesar 93,33%.
3. Penyertaan Modal dan deviden secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2020. Penyertaan modal yang dilakukan pada PT. Bank SolutGo akan terus memperoleh hasil keuntungan dari usahanya yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan kepada PAD, sekaligus perekonomian secara keseluruhan di suatu daerah, untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

- a) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan tetap konsisten melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SolutGo sesuai dengan Peraturan Daerah Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang ada, sehingga dapat terus meningkatkan penerimaan daerah dari pertumbuhan usaha dan nilai BUMD, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
- b) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus memberikan dukungan berupa kebijakan di lingkungan pemerintah dan masyarakat untuk aktif menggunakan jasa perbankan PT. Bank SolutGo dengan memaksimalkan transaksi keuangan, serta mendorong tata kelola yang efektif dan efisien pada PT. Bank SolutGo, agar terjadi peningkatan laba hasil usahanya yang nantinya akan berdampak pada peningkatan setoran Deviden untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.

Bagi PT. Bank SulutGo :

- a) Bank SulutGo diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha dalam mengelola penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Utara berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) agar dapat terus memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara.
- b) Bank SulutGo semakin memaksimalkan pengelolaan bisnis bank serta profesionalisasi baik dari segi manajemen sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai agar dapat terus menghasilkan laba untuk meningkatkan deviden sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara yang digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amosea, Rissa. 2012.** *Pengaruh Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, (Skripsi, Politeknik Negeri Bandung, 2012)
- Balfas, Hamud M. 2006.** *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : Tatanusa
- Besley, Scott, and F Eugene Brigham. 2008.** *Essentials of Managerial Finance, fourteenth edition*. USA: Thomson South-Western.
- Ghozali, Imam. 2009.** *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP
- Ghozali, Imam. 2016.** *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregory, Mankiw N. 2000.** *Teori Ekonomi Makro (Terjemahan), Edisi Keempat*. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004.** *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007.** *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mewoh, Ria Lea. 2017.** *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 (234)*.
- Triyanto, Henrikus (2015)** *Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat*. Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
- Trisno Yuwono, Pius Abdullah, 1994.** *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Weygandt, Jerry. J, Kieso Donald E., dan Kimmel Paul D. 2011.** *Accounting Principles; Pengantar Akuntansi (Buku 2)*, Rajawali Pers
- <https://www.banksulutgo.co.id/>** Situs web resmi PT.Bank SulutGo
- <https://bkad.sulutprov.go.id/>** Situs web resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara